**PENETAPAN AHLI WARIS BERDASARKAN PERKARA NOMOR
0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr TANPA WASIAT KEPADA AHLI
WARIS**

Oleh: Muhammad Noer Geo Miyana
Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn
Pembimbing II: Riska Fitriani, SH., MH
Alamat: Jalan Bakti Perum Wijaya Kusuma Blok C, Pekanbaru
Email: geomiyana26@gmail.com - Telepon : 085214017888

ABSTRACT

Chronological case number: 0675 / PdtG / 2013 / PA.Pbr. June 20, 2014, the late Hj. Sofiah binti Edek who own property together as husband and wife, in the form of a piece of land and its permanent building on teletak in Jalan Rajawali No. 62, RT.02, RW 04, Village Kedung Sari, District Sukajadi, Pekanbaru. The purpose of this thesis, namely; First, to determine the consideration of judges on case No. 0280 / Pdt.G / 2015 / PA. Pbr intestate heirs, Secondly, to find out the judge's decision was appropriate according to Islamic law.

This type of study can be classified in this type of normative juridical research, which is a type of research that discusses the principles of law. This research was conducted by examining the library materials or secondary data in the form of legislation and the books written by legal experts associated with the title of the research, articles, journals, and other sources. Federally data sources used, the primary data, secondary data and data tesier, data collection techniques in this study with the study of literature or documentary studies.

Based on the research there are two principal issues that can be inferred. First, Based on legal considerations and basic provisions of the law are used, the judge ruled that the right to be heir consists of four (4) persons younger boys and four (4) girls are Hj. Nurjanah bint Khalib Dain girls, Nurman bin Khalib Dain son-worthy, Nurhadi bin Khalib Dain son, Muhammad Aini bin Khalib Dain son, Rosma bint Khalib Dain daughter, Nurhayati binti Khalib Dain girls, Jamaluddin bin Khalib Dain son and daughter Khalib Dain Jaliah girls who all reside di Pekanbaru. Second, the judge's decision on case No.0280 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr there needs to be corrected according to Islamic law and contains the value or the quality of legal certainty. Land Hj. Sopiah bint Edek number of 325.08 m² while the verdict of land distributed to the heirs of 324 m², the division of the estate Hj. Edek and Sopiah binti Hj. Nurjanah bint Khalib first plaintiff who had died on Saturday 04th of April 2015. Based on the case that the Islamic law of inheritance, the heirs male resident balanced by the heiress in accordance with the position and function in families where male heir and women gained the right to a comparison 2: 1 (two to one). Suggestions Author, First Should the division of the inheritance of each heir can finish it amicably, because not a few families divided because of the division of the inheritance. Second, Sebeium apply to court and claim inheritance should know in advance where the heirs and follow the procedures in the Religious Court.

Keywords : Islamic Inheritance - Legal Considerations - Religious Court

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perdata di Indonesia masih bersifat *pluralisme* karena sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Hukum Islam yang demikian luas dengan berbagai hal yang terkait dengan demikian luas dengan berbagai hal yang berkaitan dengan hukum menjadi singkat dalam ungkapan Mac Donald yang menyebut hukum Islam adalah ‘*The Science of all things, human and devine*’.¹ Hukum Islam mempunyai kedudukan tersendiri, walaupun tidak seluruh hukum perdata Islam merupakan hukum positif di Indonesia, tetapi bidang-bidang tertentu hukum perdata Islam telah menjadi hukum positif. Bidang-bidang tertentu dimaksud adalah kekayaan intelektual, hukum keluarga, dan hukum perusahaan, hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.²

Hukum waris Islam pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan hukum waris pada umumnya (hukum waris Barat dan hukum waris adat), yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang. Selain itu masalah warisan merupakan suatu masaiyah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan ahli waris atau dengan pihak ketiga.

¹ Mac Donald, 1965, “Development of Muslem Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory”, Khayats Oriental Reprint, Beirut.

² Mifa Al Fahmi, *Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum, USU Law Journal, Vol.5.No.1 Januari 2017, hlm. 77.

Sistem hukum kewarisan Islam yang lazim disebut dengan hukum *faraid* merupakan bagian dari keseluruhan hukum islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan sifat-sifat yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sistem hukum waris islam juga terdiri atas pluralism ajaran, misalnya sistem kewarisan *ahlus sunnah wal jama'ah*, ajaran *syiah*, serta ajaran *hazairin* Indonesia. Sistem hukum waris yang paling dominan dianut di Indonesia, yaitu ajaran *ahlus sunnah wal jama'ah* (*mazhab syafi'i, hanafi, hambali, dan maliki*). Akan tetapi yang paling dominan diantara keempat mazhab yang dianut di Indonesia adalah *mazhab syafi'i*, disamping ajaran *hazairin* yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia. Hal ini sebagai *ijtihad* untuk menguraikan hukum kewarisan dalam alquran secara bilateral.³

Pewarisan merupakan suatu sistem hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuknya karena kematian pewaris.⁴ Hal ini dapat diartikan bahwa adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya, dan dengan adanya peristiwa hukum yaitu

³ Manian Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 6.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 194.

meninggalnya seseorang tidak mengakibatkan hilangnya perhubungan-perhubungan tersebut, karena hukum telah mengatur bagaimana cara perhubungan itu dapat diselamatkan agar sesuai dengan tujuan hukum yang mengaturnya dari kepentingan-kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum tersebut karena makna undang-undang atau hukum umum yang tidak konsisten.⁵ Ketiadaan pengaturannya adalah dalam bidang hukum waris dan ini akan memerlukan waktu berhubung hukum adat sendiri satu sama lain berbeda karena dalam struktur masyarakatnya, berbeda juga dalam sistem keluarga yang dianut masing-masing masyarakat itu, juga sistem kewarisannya.⁶ Kebingungan mungkin berasal dari latar belakang budaya dan etnis yang berbeda, praktik bisnis dan adat istiadat, dan tradisi hukum.⁷

Pembagian harta waris di lingkup masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sering menimbulkan konflik diantara ahli waris, banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris. Oleh karena itu pemahaman dalam pembagian berapa besar hak atas harta warisan dan kedudukan siapa-siapa yang berhak tampil sebagai ahli waris sangatlah penting untuk menghindari setidaknya mengurangi perselisihan dalam sengketa waris. Keadaan ini berlangsung sepenuhnya demikian

sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Perkawinan). Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan saja, melainkan merupakan suatu usaha unifikasi dalam bidang hukum keluarga.

Kronologis kasus HJ. Nurjanah binti Khalib Dain sebagai Penggugat I, Nurman bin Khalib Dain sebagai Penggugat II, Nurhadi bin Khalib Dain sebagai Penggugat III, Muhammad Aini bin Khalib Dain sebagai Penggugat IV, Rosma binti Khalib Dain sebagai Penggugat V dan telah memberikan kuasa kepada H. Dainir Piliang, SH, S.Fil. Advokat /Pengacara yang beralamat di jl Paus Ujung nomor 09 di Kota Pekanbaru, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2015 di sebut sebagai kuasa hukum para Penggugat melawan Nurhayati binti Kahlib Dain selaku Tergugat I, Jamaluddin bin Kahlib Dain selaku Tergugat II, Jaliah binti Kahlib Dain selaku tergugat III.

Perkara ini dimulai sejak masih hidupnya almarhum Khalib Dain dengan almarhumah Hj. Sofiah binti Edek yang memiliki harta bersama selaku suami istri, berupa sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya yang teletak di Jalan Rajawali Nomor 62, RT.02, RW 04, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Tanah ini sudah disertifikatkan dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1368, tertanggal 05 November 1985, atas nama Khalib Dain, luas tanah lebih kurang 578 m². Harta bersama perkawinan almarhum Khalib Dain dengan almarhumah Sofiah binti Edek, tersebut di atas, telah dibagi kepada ahli waris, sebagaimana putusan perkara Nomor: 0675/PdtG/2013/PA.Pbr. tanggal 03 Maret 2014 dan telah di eksekusi

⁵ Eric Goldman, 2006, "Integrating Contract Drafting Skills And Doctrine", The Journal Of The Legal Writing Institute, U.S. Government Works.

⁶ *Ibid*, hlm. 16.

⁷ Todd F. Volyn, 1993, "Consummation In International Technology Transfers", The Journal of Law and Technology, U.S. Government Works.

sesuai berita acara eksekusi nomor: 0675/PdtG/2013/PA.Pbr. tanggal 20 Juni 2014.

Adapun bagian Hj. Sofiah binti Edek dalam tanah seluas = 559 m², tersebut poin b di atas hanya seluas 325,08 m², harta inilah yang dimohonkan untuk dibagi sesuai ketetapan kepada ahli waris yang berhak. Pembagian harta warisan tanpa wasiat pada dasarnya dilakukan berdasarkan kebiasaan yang ada dan Undang-Undang yang mengaturnya dan pertimbangan hukum yang diambil para hakim dalam putusannya adalah perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya tergugat), terhadap putusan jika tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan 153 R.Bg.

Para pihak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan mal waris sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atau Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara aquo.

Majelis berpedoman kepada Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti tertulis

yang diajukan oleh para penggugat melalui kuasa hukumnya maka sepakat mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan biaya perkara dibebankan pada penggugat.

Menetapkan ahli waris Hj Sofiah Binti Edek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hj Nurjanah Binti Khalib Dain sebagai anak perempuan;
- b. Nurman Bin Khalib Dain sebagai anak laki-laki;
- c. Nurhadi Bin Khalib Dain sebagai anak laki-laki;
- d. Muhammad Aini Bin Khalib Dain sebagai anak laki-laki;
- e. Rosma Binti Khalib Dain sebagai anak perempuan;
- f. Jamaluddin bin Khalib Dain sebagai anak laki-laki;
- g. Jaliah Binti Khalib Dain sebagai anak perempuan.

Menetapkan bagian harta warisan para penggugat dan para tergugat tersebut sesuai dengan bagian masing-masing baik secara natura maupun dijual melalui proses lelang dan hasilnya dibagi sesuai pembagian masing-masing.

Serta menyatakan Hj Nurjanah Binti Khalid Dain telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2015 karena sakit di Pekanbaru dan menetapkan ahli waris serta harta warisannya, dan menghukum, para pihak atau ahli waris untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing, baik secara natura maupun di jual melalui proses lelang dan hasilnya di bagi sesuai pembagian masing-masing lalu membebankan biaya perkara kepada para penggugat hal ini sesuai putusan yang peneli lampirkan.

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang penulis tertarik mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian berjudul :“**PENETAPAN AHLI WARIS BERDASARKAN PERKARA NOMOR 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr TANPA WASIAT KEPADA AHLI WARIS**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim atas perkara Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanpa wasiat pada ahli waris ?
2. Apakah putusan hakim sudah sesuai menurut hukum islam ?

C. Pembahasan

A. PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERKARA NOMOR 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr TANPA WASIAT PADA AHLI WARIS

Dalam hukum islam ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan pewaris, Ahli waris dapat diklasifikasikan dengan rumusan beragam sesuai dengan sudut pandangnya ada yang mengelompokkan dari sudut sebab-sebabnya, bagian-bagian yang diterimanya, jauh dekatnya hubungan kekerabatan. dan dari sudut pandang jenis kelamin ahli waris itu sendiri.⁸ Ahli waris yang berhak atas warisan selain pasangan diberi peringkat adalah keturunan garis keturunan

darah, orangtua, saudara dan saudari, kakek neneknya di pihak ayah dan ibu pewaris, kasus perkara Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr. yang berhak menjadi ahli waris dari Hj. Sopiah binti Edek adalah keturunan-keturunan dari Hj. Sopiah binti Edek.

Macam-macam ahli waris ditinjau dari sebab-sebabnya, dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu :⁹

Ahli waris *Nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah; artinya orang yang berhak memperoleh harta waris karena ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia. Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *al-mmvarris* didasarkan pada hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Untuk memudahkan pemahaman lebih lanjut. akan penulis bahas Ahli waris *nasabiyah* berdasarkan kelompok dan tingkatan kekerabatannya. Ahli waris laki-laki, jika didasarkan pada urutan kelompoknya adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Anak laki-laki;
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah;
3. Bapak;
4. Kakek dari garis bapak dan seterusnya ke atas;
5. Saudara laki-laki sekandung;
6. Saudara laki-laki seapak;
7. Saudara laki-laki seibu;
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
10. Paman sekandung;

⁸ Grace Ying, *Inherikance Dispute Resolution in Palwan Tribes*, Nasional Taiwan University Law Review, Rev 289, September 2015.

⁹ Dr. Kaharuddin. S .Ac. M.Hum, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Milra Wacana Media, Jakarta: 2015, hlm. 221.

¹⁰ *Ibid*.

11. Paman sebakak;
12. Anak laki-laki paman sekandung;
13. Anak laki-laki paman sebakak;

Pembagian warisan dalam islam laki-laki diutamakan, perkara Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Hj. Sopiah binti Edek mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki kandung yang berhak mendapat harta warisan dari Hj.Sopiah binti Edek, dan dimana anak laki-lakilah yang lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan menurut hokum islam.

Adapun ahli waris perempuan semuanya ada 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut :¹¹

1. Anak perempuan;
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah;
3. Ibu;
4. Nenek dari garis bapak;
5. Nenek dari garis ibu;
6. Saudara perempuan sekandung;
7. Saudara perempuan sebakak;
8. Saudara perempuan seibu.

Perkara Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Hj. Sopiah binti Edek mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan kandung yang juga berhak dalam pembagian harta warisan dari Hj. Sopiah binti Edek, karena dalam hokum waris islam jika anak perempuan tersebut dua orang atau lebih, maka mereka berhak mendapat dua pertiga secara bersama-sama.

Ahli waris *Sababiyah* yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena Hubungan perkawinan yang sah (*al-musaharah*) dan masih berjalan (tidak bercerai) pada saat suami atau isteri meninggal dunia (QS. 4:12).¹² Pasangan suami istri memiliki hak untuk saling mewarisi ketika salah satu seorang dari mereka meninggal dunia. Seiaama tidak ada halangan yang membuat keduanya

tidak dapat saling mewarisi. Sebagai ahli waris *sababiyah*. mereka dapat menerima bagian warisan apabila perkawinan suami istri itu sah, baik menurut ketentuan hukum agama maupun sipil. dan memiliki bukti-bukti yuridis. Artinya secara administratif sah menurut hukum yang berlaku. Demikian juga hubungan kewarisan yang timbul karena sebab memerdekakan hamba sahaya. hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dan mengada-ada informasi dekat (banyak) manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. perkara Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr, Penggugat Hj.Nurjanah binti Khalib Dain meninggal dunia harta yang dimiliki Hj.Nurjanah binti Khalib Dain berhak dibagikan kepada ahli warisnya.

Dalam putusan perkara Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr, hakim mendasarkan putusannya berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum sebelumnya, diantaranya putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0675/Pdt.G/2013/PA.Pbr, tanggal 03 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara dalam menetapkan ahli waris, selain mendasarkan pada pertimbangan sejumlah putusan Pengadilan Agama sebelumnya, hakim juga berpegangan pada ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. penjelasan umum pasal 1 huruf (f), ketentuan pasal 96, pasal 179 Kompilasi Hukum Islam serta QS. An-Nisa 4 ayat 11 QS. An-Nisa 4 ayat 12, QS An Nisa 4 ayat 176 dimana dengan pembagian harta warisan.¹³

Penetapan ahli waris adalah suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam suatu

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

permohonan yang diajukan oleh ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa. “Untuk melakukan penetapan ahli waris seseorang atau beberapa orang telah mendapatkan harta warisan dari anggota keluarganya yang telah meninggal, maka untuk melegalisasi kepemilikan hak atas warisnya secara hukum, mestilah dibuatkan Surat Ketetapan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama Kota Palembang. Fatwa waris dari salah satu Pengadilan Agama dapat dipergunakan untuk pengurusan seluruh harta peninggalan pewaris di dalam wilayah Republik Indonesia. Fatwa Waris tersebut memang merupakan bukti kelengkapan untuk proses pengurusan baik itu jual beli atau peralihan hak atas tanah warisan dimaksud. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.¹⁴

Bahwa dalam kasus perkara Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr., harta bersama Hj. Sopiah binti Edek tersebut meninggalkan harta warisan yang belum dibagikan kepada anak-anaknya sebesar 325,08 m² dan tanah tersebut telah disepakati untuk dibangun Ruko (rumah toko) namun belum terwujud. Penggugat tetap untuk membangun ruko di objek tanah tersebut tetapi tergugat berubah fikiran menolak untuk membuat ruko, alm Hj. Sopiah binti Edek tidak membuat surat wasiat terhadap pembangunan ruko tersebut, pada kasus ini juga penggugat atas nama Hj. Nurjanah binti Khalib Dain meninggal dunia

harta yang dimilikinya harus dibagikan kepada ahli warisnya.¹⁵

Pertimbang Keputusan hakim dalam perkara terutama pada ketentuan ketentuan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dimana berbunyi sebagai berikut:¹⁶

Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”

Harta Hj. Sopiah binti Edek diperoleh dari perkawinannya dengan suaminya yang telah dibagi rata, pada putusan hakim harta yang dimiliki Hj. Sopiah binti Edek masih harta milik bersama yang belum dibagi kepada ahli warisnya, semasa hidupnya tanah tersebut akan dibangun ruko namun belum terwujud, namun Hj. Sopiah binti Edek tidak membuat surat wasiat terhadap harta warisannya tersebut, dijelaskan dalam QS Al-Baqarah [2] : 180 :¹⁷

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِمَا عُرِفَ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa

Jika seseorang memiliki tanda-tanda kematian seharusnya membuat suatu wasiat terhadap harta warisannya supaya tidak adanya komplik sesama ahli waris terhadap warisan yang mereka dapatkan.

¹⁴ Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

¹⁵ Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

¹⁶ Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 37.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan dasar ketentuan hukum yang digunakan, hakim memutuskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki kandung dan 4 (empat) orang anak perempuan adalah Hj. Nurjanah binti Khalib Dain anak perempuan, Nurman bin Khalib Dain anak laki-laki, Nurhadi bin Khalib Dain anak laki-laki, Muhammad Aini bin Khalib Dain anak laki-laki, Rosma binti Khalib Dain anak perempuan, Nurhayati binti Khalib Dain anak perempuan, Jamaluddin bin Khalib Dain anak laki-laki, dan Jaliah binti Khalib Dain anak perempuan yang kesemuanya bertempat tinggal di Pekanbaru.¹⁸

Dalam QS. An-Nisa 4 ayat 11 dijelaskan bahwa Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu 2:1,¹⁹ Mengatur tentang perolehan dua orang anak perempuan atau lebih dari dua orang, mereka mendapat duapertiga dari harta peninggalan, Mengatur tentang perolehan seorang anak perempuan, yaitu seperdua dari harta peninggalan, Mengatur tentang perolehan ibu bapak, yang masing-masing seperenam dari harta peninggalan kalau si pewaris mempunyai anak, Mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak dan saudara, maka perolehan ibu sepertiga dari harta peninggalan, Mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara, maka perolehan ibu seperenam dari harta peninggalan, Pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud diatas

sesudah dibayarkan wasiat dan utang pewaris.

Namun Penggugat Hj. Nurjanah binti Khalib Dain meninggal dunia pada 14 Juli 2014 jadi harta waris dari Nurjanah harus dibagi kepada ahli waris. Dalam kompilasi hukum islam Ahli waris dari Hj. Nurjanah binti Khalib Dain yaitu Azhari Saleh bin M. Saleh Suami, Nurman bin Khalib Dain saudara laki-laki, Nurhadi bin Khalib Dain saudara laki-laki, Muhammad Aini bin Khalib Dain saudara laki-laki, Rosma binti Khalib Dain saudara perempuan, Nurhayati binti Khalib Dain saudara perempuan, Jamaluddin bin Khalib Dain saudara laki-laki, dan Jaliah binti Khalib Dain saudara perempuan.

Dalam Hukum waris Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt,²⁰ tertata secara rapi dan sistematis, terutama ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan.

B. PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA NOMOR 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr SUDAH SESUAI MENURUT HUKUM ISLAM

Putusan hakim atas perkara Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr perlu ada yang dikoreksi sesuai hukum islam dan mengandung nilai kualitas atau kepastian hukum. Putusan hakim dalam jumlah tanah warisan yang dibagi kepada ahli waris. Tanah Hj. Sopiah binti Edek sejumlah 325,08 m² sedangkan dalam putusan hakim tanah yang dibagikan kepada ahli waris

¹⁸ Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

¹⁹ Otito, *Op Cit*, hlm. 22.

²⁰ Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalamn Masyarakat Bugis)", *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol. 1, Nomor 2, 2016, hlm. 203.

sebesar 324 m², menurut penulis seharusnya pembagian harta warisan tanah tersebut sejumlah 325 m², pembagian harta waris Hj. Sopiah binti Edek dan Hj. Nurjanah binti Khalib penggugat 1 yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015, harta warisan yang dibagikan kepada Hj. Nurjanah binti Khalib harus dibagikan juga kepada ahli warisnya berupa suaminya dengan hak seharusnya. Dalam Hukum Waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) sandainya masih dalam kehidupan. Walaupun ada hak dalam mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata sebatas keperluannya semasa masih hidup dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah meninggal dunia.

Hukum waris islam tidak mengenal seperti yang di temukan dalam ketentuan hukum waris KUHPer, yang di kenal dengan pewarisan secara *ab intestato* dan secara *testamen*. Ketentuan islam juga mengenal istilah wasiat namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.²¹ Dalam kasus Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr Hj. Sopiah binti Edek tidak meninggalkan wasiat kepada ahli warisnya bahwa diatas tanah yang disengketakan oleh penggugat dan tergugat akan dibangun Ruko (rumah toko) namun belum terwujud, karena dalam islam adanya istilah wasiat dalam warisan.

Ashah al-furudh atau lengkapnya *ashab al-furud al-muqaddarah* bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam al-Qur'an dan atau Hadis Nabi saw. Mereka menerima harta warisan dalam urutan pertama. Bagian-bagian tertentu dalam

al-Qur'an adalah: 1/2. 1/4. 1/8. 2/3. 1/3. dan 1/6. Dengan demikian. dapat disimpulkan bahwa *ashab al-furudh* dibedakan menjadi dua, yaitu; *ashab al-furudh al-nasabiyah* dan *ashab al-furudh alsababiyah*. Adapun bagian masing-masing *ashab al-furudh* adalah sebagai berikut :²²

1. Anak perempuan bagiannya adalah :
 - a. 1/2 bila anak perempuan hanya sendiri.
 - b. 2/3 bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki.
2. Cucu perempuan garis laki, bagiannya adalah :
 - a. 1/2 bila cucu perempuan hanya sendirian.
 - b. 2/3 bila cucu perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai oleh cucu laki-laki.
 - c. 1/6 sebagai penyempurna 2/3 (*takmilah li al-sulusain*), jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *mahjub*.
3. Ibu bagiannya adalah :
 - a. 1/6 bila bersamanya ada anak atau cucu atau beberapa orang saudara.
 - b. 1/3 bila bersamanya tidak ada anak, cucu atau dua orang saudara.
 - c. 1/3 dari sisa harta, dalam masalah *gharrawain* bila ia bersama ayah, suami atau istri dan tidak ada bersamanya anak atau cucu.
4. Bapak bagiannya adalah:
 - a. 1/6 bila bersamanya ada anak atau cucu.

²¹ Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm, 12.

²² Dr. Kaharuddin. S .Ac. M.Hum, *Op Cit* , hlm. 223.

- b. Mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu lakilaki.
- c. $\frac{1}{6}$ dan kemudian mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.
5. Nenek jika tidak *mahjub* baik melalui ayah atau ibu bagiannya:
- a. $\frac{1}{6}$ jika seorang.
- b. $\frac{1}{6}$ dibagi rata apabila nenek lebih dari satu orang dan sederajat kedudukannya.
6. Kakek garis bapak jika tidak *mahjub* bagiannya adalah :
- a. $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki dari garis laki-laki.
- b. $\frac{1}{6} +$ sisa harta, jika bersama anak atau cucu perempuan garis lakilaki dan bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki.
- c. $\frac{1}{6}$ atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.
- d. $\frac{1}{3}$ atau *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain. Masalah ini disebut *al-jadd ma 'a al-ikhwah* (kakek bersama saudara).
7. Saudara perempuan kandung jika tidak *mahjub* bagiannya adalah:
- a. $\frac{1}{2}$ bila ia hanya seorang saja.
- b. $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
8. Saudara perempuan seapak jika tidak *mahjub*, bagiannya adalah:
- a. $\frac{1}{2}$ bila ia hanya seorang saja.
- b. $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak ada bersama saudara lakilaki sekandung.
- c. $\frac{1}{6}$ bila bersama dengan saudara perempuan kandung seorang, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (*takmilah li al-sulusam*).
9. Saudara perempuan seibu baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak *mahjub*, bagiannya adalah:
- a. $\frac{1}{6}$ bila ia hanya seorang saja.
- b. $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih.
- c. Bergabung menerima bagian $\frac{1}{3}$ dengan saudara sekandung, jika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu. Masalah ini disebut dengan *musyarokah*.
10. Suami bagiannya adalah:
- a. $\frac{1}{2}$ bila bersamanya tidak ada anak atau cucu.
- b. $\frac{1}{4}$ bila bersamanya ada anak atau cucu.
11. Istri bagiannya adalah:
- a. $\frac{1}{4}$ bila bersamanya tidak ada anak atau cucu.
- b. $\frac{1}{8}$ bila bersamanya ada anak atau cucu.

Putusan hakim atas perkara Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr, Masing-masing ahli waris Hj. Sofiah binti Edek kemudian mendapatkan bagian masing-masing sebesar:²³

1. Hj. Nurjanah binti Khalib Dain sebagai anak perempuan memperoleh $\frac{1}{12}$ bagian;
2. Nurman bin Khalib Dain anak laki-laki, memperoleh $\frac{2}{12}$ bagian;
3. Nurhadi bin Khalib Dain anak laki-laki, memperoleh $\frac{2}{12}$ bagian;
4. Muhammad Aini bin Khalib Dain anak laki-laki, memperoleh $\frac{2}{12}$ bagian;

²³ Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

5. Rosma binti Khalib Dain anak perempuan, memperoleh 1/12 bagian;
6. Nurhayati binti Khalib Dain anak perempuan, memperoleh 1/12 bagian;
7. Jamaluddin bin Khalib Dain anak laki-laki, memperoleh 2/12 bagian;
8. Jaliah binti Khalib Dain anak perempuan, memperoleh 1/12 bagian.

Ahli waris yang termasuk *ashah al-furudh al-nasabiyah* di atas adalah nomor urut 1 sampai 9; sedangkan *ashab al-furudh al-sabahiyah* adalah nomor urut 10 dan 11. Jika seluruh ahli waris tersebut di atas ada semua, maka dari mereka itu, ahli waris yang dapat menerima bagian adalah:²⁴

1. Anak perempuan 1/2
2. Cucu perempuan garis laki-laki 1/6
3. Ibu 1/6
4. Bapak 1/6 + sisa
5. Isteri atau suami 1/8 atau 1/4

Apabila ahli waris laki-laki dan perempuan seluruhnya berkumpul, maka ahli waris yang mendapat bagian hanyalah :

1. Anak perempuan bersama-sama menerima sisa
2. Anak laki-laki
3. Bapak 1/6
4. Ibu 1/6
5. Isteri atau suami 1/8 atau 1/4

Berdasarkan kasus di atas, dijelaskan bahwa dalam hukum waris Islam, ahli waris laki-laki berkedudukan seimbang dengan ahli waris perempuan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam keluarga dimana ahli waris laki-laki dan wanita memperoleh hak dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu).

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34 bahwa:²⁵ “Yang kepadanya dibebankan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan anak laki-laki itu setelah meninggal orangtuanya (bapaknya), maka ia langsung mengambil alih tanggung jawab tersebut seperti memberikan nafkah kepada saudara-saudaranya, termasuk jika ada saudaranya yang wanita ditinggal mati oleh suaminya (QS. An-Nisa: 34)”.

Pembagian harta warisan antara laki-laki dan wanita tersebut dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 176 yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:²⁶

“Allah telah menetapkan pembagian harta warisan anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan (QS. AN-Nisa: 11)”.

Ketentuan 176 KHI yang tetap mempertahankan forsi 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan dilatarbelakangi para penyusun ataupun ahli hukum Islam yang terlibat dalam penyusunan pasal 176 KHI meyakini ketentuan ayat tersebut bersifat Sarih/tafsil dan gath'i, berdasarkan pada teori standar konvensional yang menyebutkan "perbedaan jumlah bagian anak perempuan dengan anak laki-laki berdasarkan hukum imbalan dan tanggung jawab",²⁷ Perbandingan tersebut didasarkan bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan wanita, misalnya akan menjadi kepala rumah

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hidayah, Surabaya, 2002, QS An-Nisa:34.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hidayah, Surabaya, 2002, QS An-Nisa ayat 11.

²⁷ Dr. H. M. Mawardi Djalaluddin, M.Ag., “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume V, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm 118.

²⁴ *Ibid.*

tangga keluarga, dalam kasus anak-anak dari Hj. Sopiah binti Edek anak laki-laki mendapatkan 1/12 dan anak perempuan 2/12, karena dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34, ayat 11 dan 176 bahwa laki-laki memiliki beban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

Pertimbangan hakim Dalam kasus Hj. Nurjanah binti Khalib harus sesuai dengan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :²⁸

“duda mendapat separoh bagian, jika pewaris tidak meninggalkan anak dan jika pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”.

Dalam kasus Hj. Nurjanah binti Khalib penggugat 1 yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015. Dijelaskan dalam QS An Nisa 4 ayat 176 Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu):²⁹ jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam kompilasi hukum islam duda mendapatkan 1/8 jika tidak meninggalkan anak.

QS An Nisa 4 ayat 176 menjelaskan bahwa :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَكَذَا لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ بَيْنَ الَّذِينَ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”³⁰

Dijelaskan bahwa Harta dari Nurjanah harus dibagikan pada ahli warisnya karena jika seorang meninggal dunia harta warisan dari orang tersebut harus dibagikan kepada

²⁸ Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Otito, *Op Cit.*

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hidayah, Surabaya, 2002.

ahli warisnya, Hj. Nurjanah binti Khalib memiliki suami dan tidak mempunyai anak yang berhak mendapatkan harta warisan darinya serta hartanya dibagikan kepada saudara-saudara sekandung dimana bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan, jadi Hj. Nurjanah binti Khalib di wariskan seorang suami bernama Azhari Saleh bin M. Saleh. Jadi seharusnya masing-masing ahli waris mendapatkan :³¹

1. Azhari Saleh bin M. Saleh sebagai suami, memperoleh 1/8 bagian;
2. Nurman bin Khalib Dain anak laki-laki, memperoleh 2/3 bagian;
3. Nurhadi bin Khalib Dain anak laki-laki, memperoleh 2/3 bagian;
4. Muhammad Aini bin Khalib Dain anak laki-laki, memperoleh 2/3 bagian;
5. Rosma binti Khalib Dain anak perempuan, memperoleh 1/3 bagian;
6. Nurhayati binti Khalib Dain anak perempuan, memperoleh 1/3 bagian;
7. Jamaluddin bin Khalib Dain anak laki-laki, memperoleh 2/3 bagian;
8. Jaliah binti Khalib Dain anak perempuan, memperoleh 1/3 bagian.

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan hak-hak yang harus diperoleh dari harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.³² Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik antara ahli waris akibat kesalahpahaman dalam pembagian harta warisan dan untuk menetapkan secara adil kepada yang

berhak menerimanya yang seharusnya diterapkan dalam kasus perkara Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan hukum dan dasar ketentuan hukum yang digunakan, hakim memutuskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki kandung dan 4 (empat) orang anak perempuan adalah Hj. Nurjanah binti Khalib Dain anak perempuan, Nurman bin Khalib Dain anak laki-laki, Nurhadi bin Khalib Dain anak laki-laki, Muhammad Aini bin Khalib Dain anak laki-laki, Rosma binti Khalib Dain anak perempuan, Nurhayati binti Khalib Dain anak perempuan, Jamaluddin bin Khalib Dain anak laki-laki, dan Jaliah binti Khalib Dain anak perempuan yang kesemuanya bertempat tinggal di Pekanbaru. Dikarenakan Penggugat 1 meninggal maka harta warisan harus dibagi kepada Ahli warisnya. *Nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekerabatannya timbul karena hubungan darah; artinya orang yang berhak memperoleh harta waris karena ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia. Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *al-mmvarris* didasarkan pada hubungan darah.
2. Putusan hakim atas perkara Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr perlu ada yang dikoreksi sesuai hukum islam dan mengandung nilai kualitas atau kepastian hukum. Putusan hakim dalam jumlah tanah warisan yang dibagi

³¹ Putusan Nomor 0280/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

³² Santy Dewi, "Analisis Terhadap Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/Ag/2009)", *Jurnal Ilmu Hukum*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hlm. 2.

kepada ahli waris. Tanah Hj. Sopiah binti Edek sejumlah 325,08 m² sedangkan dalam putusan hakim tanah yang dibagikan kepada ahli waris sebesar 324 m², pembagian harta waris Hj. Sopiah binti Edek dan Hj. Nurjanah binti Khalib penggugat 1 yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015. Berdasarkan kasus dijelas bahwa dalam hukum waris Islam, ahli waris laki-laki berkedudukan seimbang dengan ahli waris perempuan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam keluarga dimana ahli waris laki-laki dan wanita memperoleh hak dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu).

B.Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Hendaknya dalam pembagian harta warisan masing-masing ahli waris dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan, karena tidak sedikit keluarga terpecah belah karena pembagian harta warisan.
2. Sebeium mengajukan permohonan maupun gugatan warisan ke pengadilan hendaknya mengetahui dahulu keberadaan ahli waris dan mengikuti prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

a. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dr. Kaharuddin. S .Ac. M.Hum, 2015, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Milra Wacana Media, Jakarta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung.
- Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manian Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- b. Jurnal/Tesis/Skripsi/Kamus**
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hidayah*, Surabaya.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hidayah*, Surabaya.
- Dr. H. M. Mawardi Djalaluddin, M.Ag., 2017, "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume V, Nomor 1, Januari-Juni, Jakarta.
- Eric Goldman, 2006, "Integrating Contract Drafting Skills And Doctrine", *The Journal Of The Legal Writing Institute*, U.S. Government Works
- Fikri dan Wahidin, 2016, "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalamn Masyarakat Bugis)", *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol. 1, Nomor 2, Surakarta.
- Grace Ying, 2015. *Inheritance Dispute Resolution in Palwan Tribes*, *Nasional Taiwan University Law Review*, Rev 289, September
- Mac Donald, 1965, "Development of Muslem Theology,

Jurisprudence and
Constitutional Theory”,
Khayats Oriental Reprint,
Beirut

Mifa Al Fahmi, 2017, *Warisan Anak
Angkat Menurut Hukum
Adat Dan Kompilasi Hukum
Islam*, Jurnal Hukum, USU
Law Journal, Vol.5.No.1
Januari.

Santy Dewi, 2015, “Analisis Terhadap
Waris Anak Angkat
Berdasarkan Hukum Islam
(Studi Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia
Nomor 677/K/Ag/2009)”,
Jurnal Ilmu Hukum, JOM
Fakultas Hukum Volume II
Nomor 2 Oktober,
Pekanbaru.

Todd F. Volyn, 1993,
“Consummation In
International Technology
Transfers”, *The Journal of
Law and Technology*, U.S.
Government Works.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran tanah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam (KHI).